

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini, menjadikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu keharusan, karena sangatlah penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya fisik dan unsur - unsur untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat membantu kegiatan pokok tidak hanya pada sektor privat tapi juga pada sektor publik yang dirancang oleh beberapa sistem akuntansi, salah satunya sistem penggajian. Dalam dunia ekonomi, semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dari tahun ke tahun menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan lain.

Didalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah Pemberian Gaji terhadap pegawai yang bekerja dalam perusahaannya memang harus dan wajib dilakukan. Dalam lingkungan Instansi Pemerintah, Selain pemberian Gaji terhadap pegawai, adapun pemberian Tunjangan atas kinerja para pegawainya yang dikenal dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Tunjangan Kinerja Daerah yang sering menjadi *Pilot project* dari setiap daerah lain dalam membenahi kinerja aparat pemerintah. Tunjangan Kinerja Daerah tersebut diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan tenaga kontrak sebagai bonus atas kinerja yang dicapainya. Besaran Tunjangan Kinerja Daerah sendiri dapat melampaui gaji dan tunjangan structural sehingga dapat menjadi sumber motivasi bagi aparat birokrasi untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik.

Tunjangan diberikan sesuai dengan posisi dan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah. Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil harus dipertanggung jawabkan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut, sehingga mereka tidak dapat berlalai-lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang Pekerjaan Umum yang memberikan Tunjangan Kerja bagi Para Pegawainya. Pemberian Tunjangan merupakan salah satu bentuk hak yang didapatkan oleh pegawai aparatur sipil negara baik itu pegawai negeri sipil maupun

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khususnya para pegawai yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satu hal yang dapat ditempuh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu dengan memberikan insentif dan tunjangan. Karena dengan pemberian insentif dan tunjangan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang dapat dioptimalkan untuk mengerjakan pekerjaan didalam Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi tidak semua instansi atau perusahaan yang pelaksanaan pembayaran tunjangan berjalan sesuai peraturan, karena ada juga kendala yang dapat dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu kendala yang seringkali dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara yaitu keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja.

Pembayaran tunjangan kinerja tidak selalu bisa dilakukan tepat waktu. Sebenarnya yang paling ideal pembayaran dilakukan setiap bulan namun tetap tergantung kebijakan instansi/perusahaan tersebut, sehingga bisa saja tunjangan kinerja cair sekali saja dalam beberapa bulan.

Selain itu juga, pemberian tunjangan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, karena pemberian tunjangan yang tepat pada waktunya diharapkan mampu membuat karyawan merasakan kepuasan dalam pekerjaannya. Demikian juga sebaliknya, apabila terjadi keterlambatan dalam pengadaan pembayaran tunjangan kinerja ini, maka akan berdampak pada ketidakpuasan pegawai ataupun akan mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara kedepan. Dengan demikian tunjangan dapat menjadi motivasi dalam melakukan pekerjaan oleh pegawai negeri sipil di Indonesia apabila pengadaan pemberian tunjangan dilakukan tepat pada waktunya.

Tetapi tidak semua instansi pemerintah dalam pengadaan pembayaran tunjangan berjalan sesuai ketentuan dan ketepatan waktu pembayaran. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara masih mengalami hal yang demikian, pengadaan pembayaran Tunjangan kinerja daerah pegawai masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan yang terjadi seperti adanya perubahan sistem penilaian kinerja yang kemudian menyebabkan adanya perubahan data, ketidaklengkapan dokumen pendukung, atau belum adanya peraturan Kementerian/Lembaga soal pelaksanaan tunjangan kinerja, sehingga tunjangan

yang harusnya dibayarkan setiap bulannya, pada kenyataannya dibayarkan pada bulan berikutnya.

Tunjangan harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), menurut aturan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Standar Operasional Prosedur merupakan Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Standar Operasional Prosedur merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Standar Operasional Prosedur ditetapkan di setiap perusahaan atau instansi terkait, agar supaya tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan dalam pembagian Tunjangan Kerja Daerah ini.

Selain berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mencoba menganalisa permasalahan tersebut dengan mengemukakan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah yaitu, Apakah Sistem Informasi Akuntansi Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai telah diterapkan secara Efektif dan Efisien oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai telah diterapkan secara Efektif dan Efisien oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat bagi Penulis

Memberi kesempatan pada penulis untuk menambah, menerapkan dan membandingkan ilmu yang sudah diterima di bangku kuliah dengan dunia kerja nyata.

#### 2. Manfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam penerapan pemberian tunjangan yang lebih baik berdasarkan peraturan yang sudah ada.

#### 3. Manfaat bagi Pihak Lain

a. Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa lain yang akan mengambil penelitian dengan tema yang sejenis.

b. Diharapkan bisa menjadi tambahan informasi untuk mempelajari dan mengkaji keadaan serta permasalahan yang ada kaitannya dengan sistem pemberian Tunjangan Kerja.